

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga keamanan internasional. Dampaknya semakin nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, gangguan terhadap ketahanan pangan, serta kenaikan muka air laut yang mengancam wilayah pesisir di berbagai negara (IPCC, 2023). Karakter perubahan iklim yang bersifat lintas batas menjadikan kerja sama internasional sebagai instrumen penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi, karena tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi persoalan ini secara unilateral (Barston, 2019).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, perubahan pola cuaca, dan meningkatnya intensitas bencana alam berpotensi mengancam pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. World Bank (2021) memperkirakan sekitar 42 juta penduduk pesisir Indonesia berisiko terdampak banjir rob pada tahun 2050 dengan potensi kerugian ekonomi mencapai 5,5% Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk memperkuat komitmen iklim melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk target penurunan emisi dan transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Indonesia menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, teknologi, dan kapasitas implementasi. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan strategis untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan hijau, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Salah satu mitra penting Indonesia dalam konteks ini adalah China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI).

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif pembangunan global yang diluncurkan China pada tahun 2013 untuk memperkuat konektivitas, investasi, dan

kerja sama pembangunan antarnegara. Seiring perkembangannya, BRI tidak lagi berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengintegrasikan dimensi keberlanjutan melalui konsep *Green Belt and Road Initiative* (Green BRI). Sejak tahun 2017, China mulai mendorong penerapan prinsip pembangunan hijau, pengurangan emisi karbon, investasi berkelanjutan, dan pembiayaan ramah lingkungan dalam proyek-proyek BRI sebagai bagian dari komitmennya terhadap Perjanjian Paris dan agenda pembangunan berkelanjutan (Carey & Ladislaw, 2020).

Bagi Indonesia, Green BRI membuka peluang yang signifikan dalam mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai proyek kerja sama telah dikembangkan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, pengembangan kendaraan listrik dan industri baterai, serta proyek transportasi yang mendukung pengurangan emisi karbon. Selain memberikan akses terhadap investasi dan teknologi, kerja sama ini juga berpotensi membantu Indonesia mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target net zero emission yang telah ditetapkan pemerintah.

Meskipun demikian, implementasi Green BRI masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah studi menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi pembangunan hijau yang dipromosikan China dengan realitas pelaksanaan proyek di lapangan. Beberapa proyek BRI masih dikaitkan dengan investasi berbasis energi fosil, lemahnya penerapan standar lingkungan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan tata kelola keberlanjutan (Nedopil, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen Green BRI benar-benar diwujudkan dalam praktik pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin penting karena hubungan Indonesia dan China bersifat asimetris. Di satu sisi Indonesia membutuhkan investasi, teknologi, dan pembiayaan untuk mendukung agenda pembangunan hijau. Di sisi lain Indonesia perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional, standar lingkungan,

serta target perubahan iklim yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diplomasi menjadi instrumen penting untuk menjembatani kepentingan kedua negara.

Diplomasi Indonesia dalam kerangka Green BRI tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memastikan bahwa kerja sama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Melalui berbagai instrumen seperti dialog kebijakan, perjanjian bilateral, dan negosiasi proyek, Indonesia berupaya mendorong penerapan standar lingkungan yang lebih baik, peningkatan transfer teknologi hijau, serta penguatan investasi pada sektor energi terbarukan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penting antara komitmen Green BRI sebagai kerangka pembangunan hijau dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana diplomasi Indonesia dengan China efektif dalam mendorong agenda iklim nasional melalui Green BRI. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas diplomasi Indonesia dengan China dalam Green BRI terkait upaya menjembatani kesenjangan antara komitmen dan implementasi pembangunan hijau pada periode 2020–2025.

"Kesenjangan hijau (Green Gap) dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai inkonsistensi sistematis antara retorika dan komitmen pembangunan hijau yang dipromosikan dalam kerangka Green Belt and Road Initiative (Green BRI)—yang tertuang dalam perjanjian bilateral, nota kesepahaman, dan pernyataan bersama—dengan realitas implementasi di tingkat proyek, yang masih didominasi oleh investasi berbasis energi fosil, lemahnya penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), serta rendahnya transfer teknologi yang bermakna.

Kesenjangan ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu, Kebijakan (Policy Gap): Perbedaan antara komitmen hijau yang tertuang dalam perjanjian bilateral—seperti penghentian pembiayaan batu bara dan target emisi—dengan realitas investasi di lapangan. Data menunjukkan bahwa 86% investasi energi China di

Indonesia masih mengalir ke sektor fosil (Xing & Hu, 2025), dan terdapat 93 PLTU captive yang beroperasi untuk memasok listrik ke smelter nikel (IEEFA, 2024).

Kesenjangan Implementasi (Implementation Gap): Perbedaan antara standar ESG yang telah disepakati melalui instrumen seperti Green Investment Principles (GIP) dan BRI International Green Development Coalition (BRIGC) dengan penerapannya di tingkat proyek. Skor kepatuhan ESG bank-bank kebijakan China turun drastis dari 57% pada tahun 2021 menjadi hanya 21% pada tahun 2022 (Escobar & Thome, 2025).

Kesenjangan Teknologi (Technology Gap): Perbedaan antara janji transfer teknologi yang tercantum dalam berbagai perjanjian kerja sama dengan realitas ketergantungan teknologi impor. Komponen utama seperti panel surya dan floater untuk PLTS terapung masih 100% diimpor, sementara teknologi inti KCJB (sistem persinyalan GSM-R dan EMU CR400AF) sepenuhnya berasal dari China dan masih bergantung pada dukungan teknis jangka panjang (Paksi, 2026; Kompas.id, 2024)."

1.2. Pertanyaan Penelitian

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah: *"Bagaimana efektivitas diplomasi Indonesia dengan China dalam Green Belt and Road Initiative terkait menjembatani kesenjangan hijau?"*

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada efektivitas diplomasi Indonesia dengan China dalam isu perubahan iklim melalui kerangka *Green Belt and Road Initiative* (Green BRI). Ruang lingkup penelitian dibatasi pada periode 2020–2025, yang merupakan fase penting penguatan prinsip-prinsip pembangunan hijau dalam implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI).

Kajian ini menganalisis berbagai instrumen diplomasi yang digunakan Indonesia, seperti perjanjian bilateral, dialog kebijakan, serta negosiasi proyek yang berkaitan dengan agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Fokus empiris penelitian diarahkan pada proyek-proyek kerja sama BRI di Indonesia yang memiliki kontribusi terhadap mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan infrastruktur rendah karbon.

Analisis penelitian mencakup bagaimana diplomasi Indonesia memengaruhi arah kerja sama Green BRI, mendorong investasi dan transfer teknologi ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian komitmen iklim nasional Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengkaji bagaimana posisi tawar Indonesia dibentuk dan dijalankan dalam hubungan bilateral dengan China dalam konteks kerja sama pembangunan hijau.

Adapun batasan penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam mengenai dinamika politik domestik Indonesia maupun China yang tidak berkaitan langsung dengan diplomasi iklim dalam kerangka Green BRI. Penelitian juga tidak membahas aspek geopolitik global Belt and Road Initiative, dampak sosial-budaya proyek, maupun evaluasi teknis rinci terhadap setiap proyek infrastruktur yang menjadi objek kerja sama. Selain itu, penelitian tidak melakukan perbandingan dengan kerja sama iklim Indonesia bersama negara mitra lainnya di luar China.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bentuk, mekanisme, dan instrumen diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral dengan China melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI) untuk mengadvokasi dan memajukan kepentingan nasionalnya terkait isu perubahan iklim.
2. Untuk memahami upaya diplomasi iklim Indonesia dalam kerangka BRI, dengan melihat sejauh mana diplomasi tersebut berhasil mempengaruhi keputusan investasi, transfer teknologi ramah lingkungan, dan integrasi

standar hijau (*green standards*) dalam proyek-proyek yang diimplementasikan.

3. Untuk memahami posisi Indonesia dalam dinamika hubungan bilateral dengan China terkait isu iklim, dengan melihat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang membentuk kemampuan Indonesia untuk mendorong agenda iklimnya melalui platform BRI.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan perspektif baru dalam studi BRI dengan fokus pada dimensi "hijau" (*Green BRI*) dan isu perubahan iklim, serta bagaimana negara penerima seperti Indonesia melakukan negosiasi dan adaptasi terhadap inisiatif ini.
2. Memberikan informasi dan analisis yang komprehensif mengenai salah satu bentuk kerja sama internasional strategis Indonesia di bidang iklim.
3. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu kebutuhan dalam bidang keilmuan dengan mengikuti ujian pada Program Pendidikan Tinggi Empat Tahun Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

1.5. Kerangka Teoritis/Konseptual

1.5.1 Diplomasi

Diplomasi merupakan instrumen utama dalam hubungan internasional yang digunakan negara untuk mengelola hubungan, memperjuangkan kepentingan nasional, serta membangun kerja sama melalui komunikasi dan negosiasi secara damai. Menurut Barston (2019), diplomasi mencakup berbagai mekanisme interaksi antarnegara, baik melalui perundingan bilateral, forum multilateral, maupun penyusunan kesepakatan internasional. Dalam perkembangannya, diplomasi tidak lagi terbatas pada isu politik dan keamanan tradisional, tetapi juga mencakup isu-isu global seperti perdagangan, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim.

Dalam penelitian ini, diplomasi dipahami sebagai instrumen yang digunakan Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingan nasionalnya dalam kerja sama dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Melalui berbagai mekanisme seperti dialog kebijakan, kerja sama bilateral, dan negosiasi proyek, Indonesia berupaya mendorong integrasi agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam implementasi *Green Belt and Road Initiative* (Green BRI).

Selain itu, diplomasi juga berkaitan dengan penggunaan soft power, yaitu kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, kebijakan, dan citra yang positif (Nye, 2021). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut membantu menjelaskan bagaimana Indonesia membangun pengaruh dan posisi tawarnya dalam hubungan yang relatif asimetris dengan China guna memperoleh manfaat yang sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon.

1.5.2 Diplomasi Iklim

Diplomasi iklim merupakan cabang diplomasi kontemporer yang berfokus pada upaya negara dan aktor internasional dalam merumuskan, menegosiasikan, dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Menurut Chasek dan Rajamani (2021), diplomasi iklim mencakup berbagai mekanisme kerja sama yang bertujuan mendorong mitigasi emisi, adaptasi perubahan iklim, mobilisasi pendanaan iklim, serta transfer teknologi ramah lingkungan.

Dalam perkembangannya, perubahan iklim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan sebagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diplomasi iklim menjadi instrumen penting bagi negara berkembang untuk memperoleh dukungan internasional sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan nasional tetap berjalan seiring dengan komitmen global terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi iklim digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan kerja sama Green BRI sebagai sarana untuk

memperoleh investasi hijau, teknologi energi terbarukan, serta dukungan terhadap pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dengan demikian, teori diplomasi iklim membantu menjelaskan keterkaitan antara kepentingan pembangunan nasional dengan agenda iklim global dalam hubungan Indonesia–China.

1.5.3 Diplomasi Iklim

Diplomasi hijau (Green Diplomacy) merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang menempatkan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Kanie dan Biermann (2021), diplomasi hijau tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan lingkungan, tetapi juga membangun legitimasi, reputasi, dan kepemimpinan dalam tata kelola lingkungan global.

Diplomasi hijau berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai bentuk kerja sama internasional, termasuk investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan transfer teknologi. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk menghubungkan kepentingan lingkungan global dengan kebutuhan pembangunan nasional melalui berbagai instrumen diplomatik.

Dalam penelitian ini, diplomasi hijau digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis efektivitas diplomasi Indonesia dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Green BRI. Melalui diplomasi hijau, Indonesia berupaya memastikan bahwa proyek-proyek kerja sama dengan China tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pengurangan emisi, pengembangan energi terbarukan, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, diplomasi hijau juga berkaitan dengan upaya membangun citra Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan utama untuk menganalisis bagaimana Indonesia menggunakan instrumen

diplomasi dalam memengaruhi desain, implementasi, dan arah pembangunan Green BRI agar selaras dengan kepentingan iklim nasional.

1.5.4 Belt and Road Initiative

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan inisiatif pembangunan global yang diperkenalkan China pada tahun 2013 untuk meningkatkan konektivitas, investasi, perdagangan, dan kerja sama pembangunan antarnegara (Summers, 2016). Awalnya BRI berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun dalam perkembangannya cakupan program ini meluas ke berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim, China kemudian mengembangkan konsep Green Belt and Road Initiative (Green BRI), yaitu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, investasi hijau, efisiensi energi, dan pembangunan rendah karbon ke dalam proyek-proyek BRI (Nedopil, 2020).

Dalam penelitian ini, Green BRI diposisikan sebagai konteks empiris sekaligus arena diplomasi yang mempertemukan kepentingan pembangunan Indonesia dengan agenda lingkungan global. Melalui Green BRI, Indonesia memperoleh akses terhadap investasi, teknologi, dan pembiayaan yang dapat mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Green BRI menjadi ruang negosiasi bagi Indonesia untuk mendorong penerapan standar lingkungan yang lebih baik dalam proyek-proyek kerja sama dengan China.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan teori Diplomasi Hijau sebagai pisau analisis utama, yang didukung oleh konsep Diplomasi, Diplomasi Iklim, dan Belt and Road Initiative (BRI), untuk menjelaskan efektivitas diplomasi Indonesia dalam mendorong integrasi agenda lingkungan ke dalam kerja sama Green Belt and Road Initiative dengan China.

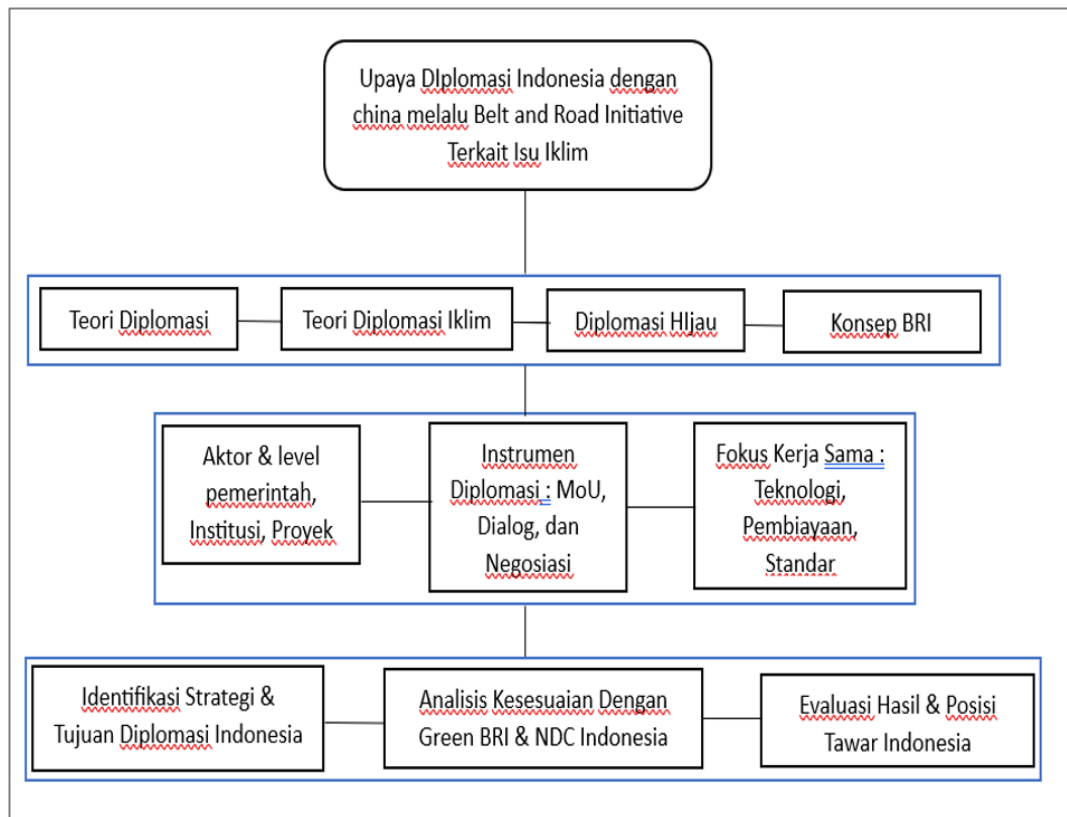
1.6 Asumsi

Penelitian ini berasumsi bahwa Indonesia secara aktif memanfaatkan *Green Belt and Road Initiative* (Green BRI) sebagai instrumen diplomasi untuk mendorong agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai mekanisme kerja sama, seperti dialog kebijakan, nota kesepahaman, dan negosiasi proyek, Indonesia berupaya mendorong penerapan standar lingkungan, transfer teknologi ramah iklim, serta investasi hijau yang selaras dengan target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Penelitian ini juga berasumsi bahwa diplomasi Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan posisi tawar Indonesia dan mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam sejumlah proyek BRI. Namun demikian, efektivitas diplomasi tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara komitmen dan implementasi, kapasitas regulasi domestik, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Green BRI.

1.7 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini digunakan untuk mengkaji efektivitas diplomasi Indonesia dengan China dalam *Green Belt and Road Initiative* (Green BRI) terkait isu perubahan iklim. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori diplomasi, diplomasi iklim, dan diplomasi hijau sebagai dasar untuk memahami aktor, instrumen, dan fokus kerja sama yang berkembang dalam hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, penelitian mengevaluasi bagaimana strategi diplomasi Indonesia dijalankan, kesesuaiannya dengan prinsip Green BRI dan target *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta dampaknya terhadap posisi tawar Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1.1. Diagram Kerangka Analisis